

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur tingkat dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami penambahan dalam jumlah kualitasnya. Menurut Kurnia (2011) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan ke arah lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pembentukan modal, dan teknologi.

Dalam proses pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya kenaikan di dalam aktivitas ekonomi di daerah tersebut, maka sebaliknya jika terjadi penurunan maka kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami penurunan (Chandra, 2012). Pusat kegiatan yang terdapat di Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas sosial dan ekonomi dengan tingkat yang cukup tinggi. Di antara enam provinsi di Pulau Jawa pertumbuhan ekonomi Jawa

konsekuensi logis dari pembangunan daerah dalam era globalisasi, globalisasi adalah tingkat persaingan yang semakin tinggi secara tidak langsung diantara penda propinsi, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Selain persoalan eksternal, di era otonomi daerah pemerintahan propinsi juga dihadapi pada masalah internal. Secara kelembagaan, otonomi daerah memberikan tantangan perubahan peranan atau kewenangan Propinsi dalam penanaman modal setelah otonomi daerah yang tidak sebesar otonomi daerah (BKPM dan KPPOD, 2008).

Salah satu teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkembang semenjak tahun 1950-an adalah teori ekonomi Neo-Klasik yang dikemukakan oleh Solow-Swan. Menurut Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi.

Investasi merupakan salah satu tolak ukur pertumbuhan ekonomi dalam bentuk akumulasi modal. Dalam upaya memajukan perekonomian baik pada tingkat nasional maupun ditingkat regional, kegiatan investasi memiliki peranan penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Peranan investasi merupakan landasan kuat bagi berlangsungnya pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dari berbagai studi iklim investasi dan daya saing daerah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar mengambil fokus pada level kabupaten dan kota. Dalam konteks kewenangan desentralisasi, hal itu bisa dipahami karena desain otonomi daerah memang dititik beratkan di

kabupaten atau kota, dan sebagian besar faktor pengaruh bagi pembentukan iklim usaha ada di rana tersebut. Akan tetapi, itu bukan berarti gambaran iklim investasi di wilayah propinsi tidak penting untuk dilihat, terutama dilihat berdasarkan sudut pandang pelaku usaha. Lingkungan usaha pada level propinsi tetap menentukan iklim usaha secara umum, hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa alasan yang pertama adalah *economies of scale*. Bahwa faktanya, batas wilayah pemerintah tidak selalu jatuh berhimpitan dengan skala ekonomi dan kegiatan usaha. Terjadinya basis potensi ekonomi atau ruang gerak usaha melampaui batas yuridiksi kabupaten atau kota sehingga membutuhkan peranan pemda provinsi yang memiliki kewenangan atas urusan lintas daerah. Kedua, *regional specific*. Para calon investor yang ingin memiliki usaha di kabupaten atau kota, bahkan dilokasi lebih terbatas. Mencermati skalah makro, yakni lingkungan regional dan pola kebijakan khusus yang berlaku secara keseluruhan di wilayah propinsi sebelum menentukan pemilihan lokasi perlokasi investasi. Ketiga *externality impact*, sebagai penentu kebijakan di tingkat wilayah (perencanaan, tata ruanag dan lain-lain), jangkauan tertentu mempengaruhi pilihan kebijakan Pemda kabupaten atau kota mengenai penanaman modal (BPKM dan KPPOD,

Tabel 1.1
Perkembangan Investasi, Tenaga Kerja dan Infrastruktur dari tahun
2010-2014 di Propinsi Jawa Barat

Tahun	Investasi (Milyar Rupiah)	Tenaga kerja (Jiwa)	Infrastruktur (Km)
2010	46.602.615.163.159	18.893.835	21.795,75
2011	48.751.176.609.700	19.356.624	22.732,79
2012	52.680.540.664.242	20.150.094	22.748,61
2013	76.507.042.741.000	20.284.633	22.751,16
2014	89.713.310.540.000	21.006.139	22.753,70

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah Jawa Barat 2015, diolah

Kuncoro (2004) mengatakan bahwa dalam kondisi persaingan daerah yang cukup tajam, pemerintah memiliki beban tugas yang harus dilaksanakan yaitu menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi. Pemerintah daerah memiliki cara tersendiri dalam meningkatkan investasi daerahnya dengan pengetahuan akan keunggulan lebih di daerahnya.

Ada beberapa hal yang berpengaruh dalam investasi, Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan investasi domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi asing. Investasi dari sektor asing dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Rustiono, 2008). Investasi dibagi menjadi dua bagian yaitu investasi asing (Penanaman Modal Asing) dan investasi domestik (Penanaman Modal Dalam Negeri) kemudian dijumlahkan menjadi satu.

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan Investasi, dapat dilihat adanya fluktuasi pada Propinsi Jawa Barat dari tahun 2010-2014. Perkembangan

Investasi di Propinsi Jawa Barat melalui data lima tahun terakhir mengalami *trend* yang cenderung meningkat. Hal ini didasarkan pada peningkatan pendapatan daerah yang diiringi dengan meningkatnya sektor pembangunan daerah sehingga menarik para pihak investor untuk menanam modalnya di Propinsi Jawa Barat. Pada tahun 2010 sebesar Rp46.602.615.163.159 sampai dengan 2012 cenderung mengalami peningkatan sebesar Rp52.680.540.664.242 sampai pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup drastis sebesar Rp89.713.310.540.000.

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan pembangunan ekonomi agar semakin meningkat. Pada dasarnya tenaga kerja merupakan modal sumberdaya manusia untuk pertumbuhan dan perbaikan suatu wilayah. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas pekerjaannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Peningkatan jumlah penduduk memberikan dampak positif dan dampak negatif dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Peningkatan penduduk menyebabkan bertambahnya tingkat tenaga kerja, sedangkan peningkatan penduduk yang tidak sepadan dengan tingkat kesempatan kerja akan berakibat tingginya tingkat pengangguran yang tercipta. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan.

Perkembangan jumlah tenaga kerja di Propinsi Jawa Barat selama periode tahun 2010 sampai dengan 2014, dapat dilihat adanya peningkatan tenaga kerja di tahun 2010 sebesar 18.893.835 jiwa menjadi 20.284.633 jiwa pada

tahun 2013 mengalami peningkatan hingga tahun 2014 sebesar 21.006.139 jiwa. Hal ini mengindikasikan masih tingginya tingkat tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat (dapat dilihat pada Tabel 1.1).

Salah satu hal yang turut membantu pembangunan ekonomi di suatu daerah adalah sarana infrastruktur, infrastruktur yang baik akan memudahkan tingkat perdagangan dan perekonomian di suatu daerah. Infrastruktur membantu terbukanya akses yang lebar dalam memenuhi tuntutan kegiatan perekonomian untuk meningkatkan pendapatan daerah. Perkembangan infrastruktur disetiap wilayah merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh, tersedianya jalan akan sangat membantu berkembangnya kegiatan bisnis atau usaha masyarakat suatu wilayah seiring dengan semakin baiknya ketersediaan infrastruktur jalan yang merupakan akses ke wilayah.

Perkembangan infrastruktur tahun 2010 sampai dengan 2014 cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan banyaknya pembangunan infrastruktur terutama jalan raya dan kondisi jalan yang cukup baik sehingga meningkatkan jumlah panjang jalan baik, meningkat jumlah panjang jalan sedang, meningkat jumlah panjang jalan rusak, meningkat jumlah panjang jalan rusak berat sehingga mendapatkan total jumlah panjang jalan. Pada tahun 2010 hanya peningkatan yang paling tinggi sebesar 21.795,75 km dibanding dengan tahun-tahun berikutnya yang hanya stagnan, hingga sampai tahun 2014 sebesar 22.753,70 km (dapat dilihat pada Tabel 1.1).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, menurut Sahoo, *dlek* (2010) dengan variabel yang digunakan *private investment*, *public investment*, tenaga kerja, infrastruktur dan pengeluaran pemerintah, pada penelitian ini menyimpulkan bahwa tenaga kerja infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengembangan infrastruktur di China memiliki kontribusi positif disbanding dengan *public investment* dan *private investment*. Kemudian penelitian selanjutnya Sodik (2007) variabel yang digunakan pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah tenaga kerja dan keterbukaan perdagangan. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel investasi asing didapatkan hasil tidak berpengaruh pertumbuhan ekonomi dan tidak signifikan. Selanjutnya penelitian Canning (1991) menganalisis kontribusi infrastruktur terhadap agregat output menyimpulkan efek infrastruktur telepon memiliki pengaruh positif signifikan, sedangkan panjang jalan diperoleh hasil negatif dan signifikan. Dari beberapa penelitian di atas menggunakan metode pendekatan panel data, persamaan simultan dan regresi berganda.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi antar 24 Kabupaten/Kota Jawa Barat relatif stagnan dibanding Propinsi-propinsi lain di pulau Jawa. Beberapa faktor yang nampaknya berpengaruh besar terhadap Pertumbuhan Ekonomi antar 24 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat adalah Investasi, Angkatan Kerja dan Infrastruktur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menggunakan metode Data Panel, didalam penelitian ini

penulisan mengambil judul: “**PENGARUH INVESTASI, ANGKATAN KERJA DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROPINSI JAWA BARAT: (Studi Kasus 24 Kabupaten/Kota di Jawa Barat TAHUN 2010-2013)**”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan meliputi analisis pengaruh investasi, angkatan kerja dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dengan analisis dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel terkait (*dependent variable*) sedangkan variabel bebas (*independent variable*) adalah Investasi, Angkatan Kerja dan Infrastruktur. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data *time series* dari tahun periode 2010 sampai dengan tahun periode 2013 antar 24 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik permasalahan dalam penulisan ini diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi antar 24 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh Angkatan Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 24 antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat?

3. Bagaimana pengaruh Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi antar 24 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi antar 24 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui pengaruh Angkatan Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi antar 24 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.
3. Mengetahui pengaruh Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi antar 24 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan bagi pemerintah daerah Propinsi Jawa Barat untuk mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di masa yang akan datang.
2. Bahan penelitian ini juga diharapkan berguna bagi masyarakat atau peneliti yang akan melakukan penelitian studi terkait sebagai bahan acuan untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat.